LATIHAN SOAL
MAPEL : OTK KEPEGAWAIAN
KELAS XI
SMK YPE SAWUNGGALIH KUTOARJO

1. Kegiatan ketatausahaan, mulai dari merencanakan, mengorganisasikan, mengembangkan, mengendalikan, sampai kegitan lainnya, yang terkait dengan pegawai/karyawanan merupakan pengertian dari ...
   A. Administrasi
   B. Kepegawaian
   C. Admnisitrasi kepegawaian
   D. Tenaga kerja
   E. Karyawan

2. Berikut yang merupakan prinsip-prinsip administrasi kepegawaian adalah …
   A. The right man on the right place
   B. Legalitas
   C. Professional kerja
   D. Planning, organizing, controlling, actuating
   E. Prosedural

3. Berikut yang contoh penerapan prinsip kemanusiaan dalam administrasi kepegawaian adalah ...
   A. Pegawai diberikan kesempatan untuk berpendapat
   B. Pegawai yang sakit diperbolehkan untuk tidak bekerja
   C. Seorang sarjana keuangan diberikan tugas sebagai manajer keuangan
   D. Pegawai diberikan gaji setelah bekerja
   E. Pegawai yang melanggar diberi *punishment*

4. Salah satu tujuan utama seseorang bekerja adalah ingin mendapatkan penghasilan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip administrasi kepegawaian yang disebut ...
   A. The right man on the right place
   B. Equal pay for equal work
   C. Wewenang dan tanggung jawab
   D. Efisien dan efektivitas kerja
   E. Demokrasi

5. Berikut yang termasuk salah satu asas pembinaan pegawai adalah ...
   A. Equal pay for equal work
   B. Proporsionalitas
   C. Demokrasi
   D. Kemanusiaan
   E. Prosedural

6. Seorang atasan harus dapat menjelaskan kepada pegawai bagaimana seharusnya pegawai bekerja dan apa yang diharapkan perusahaan kepada pegawai. Hal itu merupakan salah satu hal yang dilakukan seorang atasan kepada bawahan dalam rangka ...
   A. Merencanakan pegawai
   B. Mengorganisasikan pegawai
   C. Mengendalikan pegawai
   D. Mengarahkan pegawai

E. Mengawasi pegawai

7. Dalam melaksanakan pekerjaannya, seorang pegawai bekerja berdasarkan perintah/instruksi dari satu pimpinan. Hal itu termasuk prinsip yang disebut ...
   A. Kesatuan tujuan
   B. Produktivitas kerja
   C. Komando
   D. Kemanusiaan
   E. Demokrasi

8. Penduduk yang memilik usia kerja yang siap untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga disebut ...
   A. Angkatan kerja
   B. Pengangguran
   C. Bukan angkatan kerja
   D. Tenaga kerja
   E. Pegawai

9. Bukti hukum baik bagi pegawai maupun instansi/peusahaan dalam pemeliharaan dokumen merupakan fungsi ...
   A. Bukti fisik
   B. Instrument yuridis
   C. Bukti akuntabilitas
   D. Bukti kinerja suatu instansi
   E. Bukti resmi

10. Layanan beras/pakaian dinas, layanan pemeliharaan termasuk ke dalam buku layanan administrasi kepegawaian tahun 2013 mengenai ...
   A. Mutasi pegawai
   B. Administrasi pegawai
   C. Kesejahteraan pegawai
   D. Data pegawai
   E. Dokumentasi pegawai

11. Berikut yang *bukan* termasuk sumber-sumber hukum kepegawaian adalah…
   A. Undang-Undang
   B. Peraturan Presiden
   C. Hukum Adat
   D. Peraturan Pemerintah
   E. Peraturan Daerah

12. Hierarki peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia serta memiliki kedudukan paling tinggi adalah …
   A. UUD 1945
   B. Undang-Undang
   C. Pancasila
   D. Peraturan Presiden
   E. Peraturan Pemerintah

13. Peraturan yang dibuat untuk mengatur dan mengendalikan pegawai dalam tindak ataupun bekerja agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai, bersifat mengikat, baik bagi pegawai, pengusaha, maupun pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan adalah

pengertian dari …

A. yurisprudensi

B. kewajiban pegawai

C. Pensiun Pegawai

D. Regulasi Pegawai

E. Referendum

14. Peraturan yang mengatur tentang larangan adanya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) bagi pegawai yaitu ...
    A. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1961
    B. TAP MPR No.XI/MPR/1998
    C. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002
    D. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007
    E. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2007

15. Suatu kegiatan yang didalamnya mengajak saudara kerabat teman dekat untuk saling bersekongkol berkoalisi untuk melakukan tindakan yang tidak baik disebut ...
    A. Nepotisme
    B. Korupsi
    C. Kolusi
    D. Regulasi
    E. Diskriminasi

16. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 mengatur tentang ...
    A. Tunjangan Jabatan Struktural
    B. Tunjangan Jabatan Fungsional
    C. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
    D. Pokok-pokok Kepegawaian
    E. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

17. Penetapan jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan didasarkan pada keadaan yang nyata, perkiraan perluasan organisasi dan volume pekerjaan yang harus dilaksanakan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Hal ini merupakan pengertian dari …
    A. Formasi pegawai
    B. Bezetting
    C. Rekrutmen
    D. Analisis jabatan
    E. Peta jabatan

18. Jabatan yang berisi informasi tentang nama jabatan, kode jabatan, unit organisasi, ikhtisar jabatan, uraian jabatan, dan lainnya adalah pengertian dari…..
    A. Formasi pegawai
    B. Uraian jabatan
    C. Analisis jabatan
    D. Nama jabatan
    E. Bezetting

19. Hak dan kekuasaan pemegang jabatan untuk memilih, mengambil sikap, atau tindakan tertentu dalam melaksanakan tugas adalah pengertian dari …
    A. Wewenang
    B. Tanggung jawab
    C. Korelasi jabatan
    D. Tugas kerja

E. Uraian tugas

20. Dibawah ini yang termasuk tujuan adanya penetapan formasi adalah …
    A. Jumlah pegawai tidak sesuai dengan beban kerja

B. Sebagai bahan perencanaan di bidang kepegawaian
C. Kebutuhan pegawai dinyatakan dalam syarat jabatan
D. Ada jaminan tertulis dari pns
E. Komposisi jumlah pegawai tidak berubah

21. Dibawah ini yang *tidak* termasuk prinsip-prinsip penyusunan formasi adalah …
A. Jumlah pegawai sesuai dengan beban kerja
B. Formasi tersedia dengan adanya posisi jabatan yang kosong
C. Ditunjukan dengan jumlah pegawai dalam jabatan
D. Peta jabatan dan uraian jabatan hasil analisis jabatan
E. Supaya satuan-satuan organisasi terpenuhi jumlah dan mutu pegawai

22. Sarana yang dapat berupa mesin, perkakas, peralatan kerja dan alat kerja lainnya yang digunakan untuk memproses bahan kerja menjadi hasil kerja disebut ...
A. Hasil kerja
B. Perangat kerja
C. Bahan kerja
D. Uraian kerja
E. Lingkungan kerja

23. Pengusul yang menyampaikan formasi PNS dalam alur proses penyusunan PNS adalah …
A. Menteri Keuangan
B. Menteri Luar Negeri
C. Instansi Pusat
D. Menteri PAN RB
E. Kepala BKN

24. Formasi ASN terdiri dari 2 , yaitu …
A. Formasi ASN Pusat dan Formasi ASN Negara
B. Formasi ASN Dalam Negeri dan Formasi ASN Provinsi
C. Formasi ASN Daerah dan Formasi ASN Kota
D. Formasi ASN Luar Negeri dan Formasi ASN Dalam Negeri
E. Formasi ASN Pusat dan Formasi ASN Daerah

25. System yang digunakan untuk menentukan formasi yang memuat jumlah dan kualitas pegawai berdasarkan beban kerja, sifat, dan beban kerja pada waktu tertentu. Merupakan pengertian dari system penyusunan formasi dengan sistem …
A. Sistem Sama
B. Sistem Jabatan
C. Sistem Ruang Lingkup
D. Sistem Anggaran
E. Sistem Kuantitatif

26. Kegiatan untuk mengisi jabatan yang lowong, yang ada pada umumnya disebabkan oleh adanya pegawai yang berhenti, pensiun, meninggal dunia adalah pengertian dari … pegawai.
A. Pengadaan
B. Rekrutmen
C. Seleksi
D. Formasi

E. Analisis

27. Psikotest dan wawancara merupakan cara-cara yang dilakukan dalam proses rekrutmen pegawai yang dilakukan pada tahap …

A. Sourching proses
B. User proses
C. Formation proses
D. Selection proses
E. Proses tertutup

28. Tenaga kerja yang biasanya menggunakan perusahaan *head hunter* adalah …
A. Satpam
B. Office boy
C. Jasa penitipan anak
D. Cattering
E. Ahli perminyakan

29. Berikut yang termasuk sebagai jabatan fungsional keahlian adalah ...
A. Penyelia
B. Terampil
C. Ahli madya
D. Pemula
E. Mahir

30. Kementrian yang merupakan salah satu unsur dari panitia seleksi nasional pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah …
A. Kementrian Kominfo
B. Kementrian Sekretaris Negara
C. Kementrian Pertahanan
D. Kementrian Pendayahgunaan Aparatur Negara
E. Kementrian Perindustrian

31. Persyaratan usia untuk menjadi PNS maksimal adalah …
A. 35 Tahun
B. 30 Tahun
C. 40 Tahun
D. 45 Tahun
E. 32 Tahun

32. Rekrutmen pegawai melalui outsourching *tidak* boleh dilakukan terhadap …
A. Layanan kebersihan
B. Satpam
C. Penitipan anak
D. Cattering
E. Programmer

33. Informasi yang *tidak* dibutuhkan dalam kegiatan tes kesehatan bagi calon pegawai/pelamar adalah …
A. Kesehatan fisik dan jiwa
B. Penggunaan narkoba
C. Minuman keras
D. Merokok
E. Status perkawinan

34. Berikut yang *tidak* dimuat pada tahap pemerintah mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat dalam proses pengadaan PNS , yaitu …

A. Nama jabatan

B. Jumlah lowongan

C. Nama ketua panitia
D. Kualifikasi pendidikan
E. Instansi yang membutuhkan

35. Untuk melamar menjadi PNS, seorang pelamar harus berusia minimal ...
A. 17 Tahun
B. 18 Tahun
C. 21 Tahun
D. 23 Tahun
E. 19 Tahun

36. Pengangkatan pegawai berdasarkan kecakapan/kompetensi pegawai adalah termasuk …
A. spoils system
B. patronage system
C. career system
D. Merit system
E. Nepotism system

37. Salah satu dasar hukum penetapan formasi pegawai adalah …
A. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
B. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2003
C. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1974
D. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
E. Undang-undang Nomro 34 Tahun 2004

38. Dokumen yang *tidak* diperlukan sebagai syarat adminstrasi bagi pelamar yang lulus seleksi dan akan diangkat sebagai calon PNS adalah …
A. Fotocopy ijazah
B. SKCK
C. Surat Keterangan sehat
D. Kartu Keluarga
E. Surat bebas narkoba

39. Proses rekrutmen terhadap anggota keluarga, kroni, teman separtai, sesuku, dan seagama disebut…
A. Nepotisme
B. Diskriminasi
C. Outsorching
D. Head hunter
E. Head hunting

40. Berikut yang merupakan contoh pejabat Negara adalah …
A. Ibu Negara
B. Ketua KPK
C. Kepala Dinas
D. Polisi
C. Camat